

MENGURAI STRATEGI DAN LANGKAH PEMERINTAH MENGHADAPI PENGANGGURAN PASCA PANDEMI: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Prabu Adji Pangestu

Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

prabuadji15@gmail.com

Abstrack

Unemployment is not just a number in a statistical report, it is a real portrait of those who have lost their jobs, dreams, and sense of security. The COVID-19 pandemic and soaring inflation have had a major impact on the Indonesian economy. The government has moved quickly: social assistance has been rolled out, job training has been expanded, job fairs have been held, and the investment climate has been improved. However, is all that enough? Using a qualitative approach and literature study from ten scientific journals, this study critically reviews the effectiveness of these policies. Behind the good intentions, there are still many challenges in the field, especially in terms of implementation, unsynchronized data, and gaps in access. This study emphasizes the importance of collaborative strategies and human resource development as the key to strengthening the foundation of national employment.

Keywords: Unemployment, Government Strategy, COVID-19 Pandemic, Inflation, Job Training, Human Resources

Abstrak

Pengangguran bukan sekadar angka dalam laporan statistik adalah potret nyata dari mereka yang kehilangan pekerjaan, mimpi, dan rasa aman. Pandemi COVID-19 dan lonjakan inflasi membawa dampak besar bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah bergerak cepat: bantuan sosial digulirkan, pelatihan kerja diperluas, job fair digelar, dan iklim investasi diperbaiki. Namun, apakah semua itu cukup? Dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka dari sepuluh jurnal ilmiah, penelitian ini mengulas secara kritis efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut. Di balik niat baik, masih banyak tantangan di lapangan terutama dalam hal implementasi, data yang tidak sinkron, dan kesenjangan akses. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi kolaboratif dan pengembangan SDM sebagai kunci menguatkan fondasi ketenagakerjaan nasional.

Kata kunci: Pengangguran, Strategi Pemerintah, Pandemi COVID-19, Inflasi, Pelatihan Kerja, SDM

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker: No
235

Prefix DOI :

[10.8734/Argopuro.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/Argopuro.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : Argopuro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Bayangkan seseorang yang baru saja lulus kuliah, penuh semangat, membawa CV ke sana kemari, hanya untuk mendengar “maaf, belum ada lowongan.” Bayangkan pula seorang kepala keluarga yang tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya karena pandemi. Inilah kenyataan yang dialami jutaan rakyat Indonesia sejak 2020.

Pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Usaha tutup, pekerja dirumahkan, dan ekonomi melambat. Data Badan Pusat Statistik mencatat lonjakan pengangguran terbuka dari 5,23% pada 2019 menjadi 7,07% pada 2020. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok naik akibat tekanan inflasi. Masyarakat seperti terhimpit dari dua sisi: kehilangan pendapatan, dan biaya hidup yang terus melonjak.

Pemerintah pun berpacu dengan waktu. Dari bantuan sosial hingga pelatihan keterampilan, dari kartu prakerja hingga omnibus law, berbagai program diluncurkan. Namun, efektivitasnya perlu dikaji lebih lanjut: apakah program ini hanya meredakan gejala, atau sungguh menyentuh akar persoalan?

METODE PENELITIAN

isu pengangguran, kebijakan fiskal, dan pembangunan sumber daya manusia dari 2020-2025. Analisis dilakukan secara tematik, membandingkan pendekatan, kebijakan, dan realitas pelaksanaannya. Fokus utama bukan hanya pada “apa” kebijakan itu, tetapi juga “bagaimana” ia dijalankan dan diterima. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dari sepuluh jurnal ilmiah nasional yang membahas masyarakat.

PEMBAHASAN

1. **Ketika Pandemi Menyapu Kesempatan Kerja** Banyak perusahaan besar dan kecil terpaksa mengurangi karyawan. Kegiatan ekonomi berkontraksi lebih dari 5% pada kuartal kedua tahun 2020. Tak hanya itu, inflasi yang merangkak naik membuat pengusaha menahan ekspansi. Kombinasi ini menciptakan badai sempurna: hilangnya pekerjaan dan melemahnya daya beli.
2. **Bantuan Sosial: Menyambung Hidup di Tengah Krisis** Program PKH, BPNT, subsidi upah, hingga Kartu Prakerja adalah langkah cepat pemerintah menyambung nafas rakyat. Namun, tidak semua mendapatkan manfaatnya secara merata. Masalah akurasi data dan akses digital menjadi hambatan. Meski begitu, keberadaan program ini memberi dampak psikologis dan ekonomi yang signifikan bagi penerima.
3. **Pelatihan Kerja: Harapan Baru, Tantangan Baru** Pemerintah memacu pelatihan vokasi, keterampilan digital, dan wirausaha. Tantangannya? Banyak pelatihan belum menjawab kebutuhan pasar. Di sisi lain, masyarakat di daerah terpencil sulit menjangkau fasilitas pelatihan. Perlu perbaikan dari sisi kurikulum, teknologi, dan jangkauan.

4. **Bursa Kerja: Antara Peluang dan Kenyataan** Job fair dan penempatan tenaga kerja memang memperluas peluang. Tapi tanpa data yang akurat dan platform yang inklusif, program ini rawan tidak tepat sasaran. Banyak pelamar masih kesulitan mencari informasi lowongan yang sesuai dengan kompetensi mereka.
5. **Investasi dan Deregulasi: Menarik Modal, Menyerap Tenaga?** UU Cipta Kerja dan insentif pajak memberi sinyal positif bagi investor. Namun pertanyaannya: berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap? Apakah mereka dilatih untuk memenuhi standar perusahaan global? Reformasi ini harus diimbangi dengan perlindungan pekerja dan upskilling yang berkelanjutan.
6. **Kendala Lapangan: Dari Birokrasi ke Mentalitas** Tantangan kebijakan bukan hanya soal anggaran. Di lapangan, birokrasi lambat, koordinasi antarlembaga lemah, dan sebagian masyarakat masih berorientasi pada pekerjaan formal. Padahal dunia sudah bergeser ke ekonomi kreatif, digital, dan gig economy.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam menghadapi pengangguran sudah berada di jalur yang tepat, namun masih jauh dari kata ideal. Program bantuan dan pelatihan berhasil meredam gejolak, namun untuk benar-benar membangun ketahanan kerja, dibutuhkan langkah yang lebih mendalam: penguatan vokasi, kolaborasi lintas sektor, dan reformasi struktural berbasis data.

Di era digital, pengangguran bukan hanya soal tidak adanya pekerjaan, tapi juga ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan industri. Maka, strategi yang berkelanjutan harus dimulai dari pendidikan, informasi pasar kerja yang transparan, dan ekosistem usaha yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Lestari, D.S. (2023). *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19*. JESS Journal.

Nata, M.K., & Adinugraha, H.H. (2024). *Strategi Pemerintah Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran*. RISTEK Jurnal.

Nurrahman, A. (2020). *Upaya Pemerintah Mengatasi Pengangguran di Indonesia*. Jurnal Registratie IPDN.

Yosuky, D. et al. (2022). *Kebijakan Pemerintah dan Pengangguran akibat Inflasi*.

POPULER Jurnal Penelitian Mahasiswa.

Fiona et al. (2022). *Inflasi dan Pengangguran: Peran Kebijakan Pemerintah*. SEIKO Journal.

Leonard et al. (2022). *Pengangguran di DKI Jakarta dan Respons Pemerintah*. POPULER Jurnal.

Dewi, Qomar & Aldi. (2024). *Strategi Pemerintah Atasi Pengangguran di Era Digital*. Liabilitas Jurnal.

Ardianti et al. (2025). *Peran Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran dan Meningkatkan SDM*. Inovasi Makro Ekonomi.

Elsaviya, F.A. & Sari, I.D.A.F. (2023). *Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran Pasca Pandemi*. JESS Journal.

BPS. (2021-2023). *Data Statistik Ketenagakerjaan Indonesia*. Badan Pusat Statistik.